

Peran dan Komitmen Indonesia dalam “Millenium Development Goals”: (Perspektif Humas Internasional)

Ani Yuningsih

ABSTRACT

The Declaration of Millenium Development Goals (MDGs) marked a new context in global network which emphasized the role of present society toward the future of next generation. Within MDGs scheme, wealthy countries are encouraged to help their counterpart—underdevelopment countries—by donating some funds for developing their countries. Indonesia’s commitment toward MDGs was expressed by publicity means such as campaign, slogans, etc. Such actions are not enough. The commitment of Indonesia government toward MDGs as seen from International Public Relation Perspective must be implemented through a series of effort to cut poverty, which involved every citizen and stakeholders. Based on national information system, penetrated to structural and functional layers, program socialization and education could reach a maximum impact.

Kata kunci: Millenium Development Goals (MDGs), sosialisasi, edukasi, komitmen RI

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Keprihatinan mendasar bangsa kita pada saat ini adalah adanya fakta bahwa seluruh indikator kesejahteraan memperlihatkan rendahnya kualitas pembangunan manusia di Indonesia. Negeri ini diterpa berbagai bencana penyakit karena kekurangan gizi (busung lapar), flu burung, demam berdarah, dan penyakit lain akibat kerusakan lingkungan, termasuk rendahnya akses pada air bersih dan sanitasi. Angka kematian ibu melahirkan yang 307/100.000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi dan anak balita yang sekitar 40 per

1000 memperlihatkan rendahnya status kesehatan, pendidikan, dan posisi perempuan.

Kondisi ini diperparah dengan semakin tidak masuk akal biaya pendidikan dan kesehatan karena semakin kecilnya subsidi pemerintah. Pilihan privatisasi demi “kualitas”, terutama karena liberalisasi sektor pelayanan masyarakat yang disetujui dalam perundingan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), mengubah fungsi sosial lembaga pendidikan dan pelayanan kesehatan menjadi komoditas.

Keterikatan pada kesepakatan WTO tersebut merupakan suatu paradoks di tengah kondisi masyarakat Indonesia yang, jangankan mengikuti

mekanisme liberalisasi pasar di bidang pendidikan dan kesehatan, pemerataan pembangunan ekonomi saja hingga kini belum bisa dicapai. Di sisi lain penindasan dan eksploitasi tenaga kerja berlangsung dengan modus yang lebih canggih, seperti penggunaan tenaga *outsourcing* dan tuntutan Kelenturan Pasar Kerja (LMF) atas nama efisiensi di pabrik-pabrik industri, membuat hak buruh semakin tak terlindungi, dan penganggur pun semakin merajalela.

Keperihatinan yang sama juga melanda beberapa negara berkembang lainnya, yang menjadi titik perhatian dunia, khususnya organisasi dunia PBB, sehingga mendorong PBB mengeluarkan deklarasi dan penancangan Millenium Development Goals (MDGs), yang intinya bertujuan melaksanakan berbagai program pemerataan pembangunan, agar tingkat kemiskinan di dunia berkurang, bahkan bisa dihapuskan. Melalui komitmen seluruh bangsa-bangsa diharapkan negara maju membantu menyisihkan keuntungannya bagi kepentingan pembangunan dan pengentasan kemiskinan di negara-negara berkembang. Hal ini didesak kenyataan bahwa saat ini di luar masalah terorisme dan Hak Azasi Manusia (HAM). Masalah dunia yang paling akut adalah menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang semakin tajam. Berawal dari keperihatinan inilah Jeffrey Sachs, Direktur Program MDGs PBB, melahirkan ide MDGs, melalui buku *The End of Poverty*, yang oleh beberapa pengkritiknya dinilai terlalu utopis.

Program MDGs tentunya memberi secercah harapan bagi Indonesia, karena PBB diharapkan mendorong negara-negara maju untuk mengikuti skema mendanai pembangunan negara miskin. Namun masalahnya, akankah mereka melakukan hal tersebut dengan sukarela tanpa memiliki agenda politik tersendiri? Selain itu, bagaimana peran dan komitmen pemerintah Indonesia sendiri dalam melaksanakan program MDGs? Jalan keluar atas masalah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, pada dasarnya merupakan kewajiban ikhtiar dari pemerintah dan seluruh warga masyarakat sendiri

untuk menanggulangnya. Sangatlah tidak etis kalau kita hanya menadahkan tangan pada negara maju agar mengiur untuk GDP nasional dan mendanai pembangunan nasional, sementara kita sendiri berpangku tangan. Meskipun MDGs sendiri menunjukkan keberpihakan dan kepedulian terhadap masalah kemiskinan dan kesenjangan tersebut.

Dalam perspektif humas internasional, citra dan pandangan umum tentang suatu negara dan bangsa sangat kompleks, dan biasanya memang sudah berakar lama dan melekat. Citra dan pandangan umum dunia terhadap Indonesia belum banyak berubah, sebutan negara terkorup, pelanggaran HAM, jam karet, dan “semua bisa diatur” (ketidakpastian aturan dan hukum), dan beberapa cap negatif lainnya menunjukkan bahwa citra buruk Indonesia di mata dunia belum banyak berubah. Upaya promosi citra yang membutuhkan tenaga dan biaya besar, acapkali sia-sia ketika dihadapkan pada kenyataan sosial, politik, keamanan, dan ekonomi di negara ini yang jauh dari “pencitraan” yang dislogankan. Upaya promosi citra juga seringkali berhadapan dengan berbagai penilaian dan peringkat yang secara periodik dikeluarkan lembaga-lembaga internasional, seperti indeks tahunan tingkat korupsi yang dikeluarkan *Transparency Internasional*. Kondisi ini tentunya menambah beratnya beban moral yang harus dipikul bangsa ini ketika bermaksud menggalang bantuan dan kerjasama dalam menanggulangi berbagai masalah yang terkait dengan program MDGs.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, dirumuskan beberapa identifikasi masalah yang akan dibahas lebih rinci dalam tulisan ini, sebagai berikut:

- (1) Masalah-masalah apa yang ada seputar realisasi program MDGs di Indonesia?
- (2) Bagaimana peran dan komitmen pemerintah Indonesia dalam program MDGs?
- (3) Dalam perspektif humas internasional, faktor-faktor apa saja yang harus menjadi perhatian dalam realisasi program pengentasan kemiskinan di Indonesia?

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Tinjauan Dokumen Akhir KTT Dunia 2005

Dokumen akhir yang dihasilkan dari KTT Dunia 2005, yang berlangsung 14-16 September, di Markas Besar Perserikatan PBB New York, masih mengidam-idamkan terwujudnya sebuah dunia yang aman, damai, makmur, dan bermartabat bagi seluruh umat manusia. Dokumen akhir KTT terdiri dari bagian-bagian besar, yaitu nilai-nilai dan prinsip-prinsip (*values and principles*):

- (1) Pembangunan (*development*)
- (2) Perdamaian dan keamanan kolektif (*peace and collective security*)
- (3) Hak asasi manusia dan supremasi hukum (*human rights and the rules of law*)
- (4) Penguatan PBB (*strengthening the united nations*)

Pada bagian nilai-nilai dan prinsip-prinsip, terdapat 16 butir pernyataan yang berisi penegasan komitmen para kepala negara. Antara lain disampaikan, “Kami menegaskan kembali keyakinan kami kepada PBB dan komitmen kami kepada tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB dan hukum internasional, yang merupakan landasan-landasan yang sangat diperlukan bagi dunia yang lebih damai, makmur, dan adil.”

Pada butir lain disebutkan, bahwa prinsip pemerintahan yang baik dan penegakan hukum di tingkat nasional maupun internasional merupakan sesuatu yang esensial bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pembangunan berkelanjutan, dan penghapusan kemiskinan dan kelaparan. “Kami mengakui bahwa tata pemerintahan yang baik dan supremasi hukum di tingkat nasional dan internasional sangat esensial bagi pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, dan penghapusan kemiskinan dan kelaparan.”

Pada bagian pembangunan terdapat beberapa subbagian yang mendapatkan penekanan, yaitu kemitraan global bagi pembangunan, pendanaan bagi pembangunan, mobilisasi sumber-sumber daya domestik, investasi, utang, perdagangan, komoditas, inisiatif yang berdampak cepat, isu-isu

sistemik dan pengambilan keputusan ekonomi global, kerjasama selatan-selatan, pendidikan, pembangunan pertanian dan pedesaan, lapangan kerja, pembangunan berkelanjutan, HIV/AIDS-malaria-TBC, dan masalah-masalah kesehatan lainnya. Kesetaraan jender dan penguatan perempuan, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pembangunan, migrasi dan pembangunan, Negara-negara dengan kebutuhan spesifik, dan pemenuhan kebutuhan khusus Afrika.

Ditegaskan, misalnya, determinasi untuk memastikan realisasi secara bertahap dan sepenuhnya sasaran-sasaran dalam MDGs sebagai upaya terpadu untuk menghapuskan kemiskinan.

Mereka juga berkomitmen memajukan pengembangan sektor-sektor produktif di negara-negara sedang berkembang agar memungkinkan mereka berpartisipasi secara efektif dalam pengambilan keputusan dan mengambil keuntungan dari proses globalisasi. Penegasan komitmen para kepala negara atas MDGs dan kemitraan global itu, juga diperkuat dengan penegasan komitmen mereka atas pemerintahan yang baik di semua tingkatan, kebijakan-kebijakan yang terbuka dan tepat sasaran, penegakan hukum, mobilisasi sumber-sumber daya domestik, memajukan perdagangan internasional sebagai mesin bagi pembangunan, meningkatkan keuangan internasional, dan kerja sama teknis bagi pembangunan, pengelolaan pinjaman keuangan secara berkelanjutan, dan pengurangan pinjaman-pinjaman dari luar.

Di bidang perdamaian dan keamanan kolektif, terdapat sub-sub bagian penyelesaian sengketa, penggunaan kekuatan di bawah Piagam PBB, terorisme, penjaga perdamaian, penciptaan perdamaian, sanksi-sanksi, kejahatan lintas negara, perempuan dalam pencegahan dan penyelesaian konflik, perlindungan anak-anak dalam situasi konflik bersenjata. Dalam salah satu butirnya disebutkan, misalnya, penguatan komitmen untuk bekerja menuju sebuah konsensus keamanan dengan mengakui bahwa berbagai ancaman itu saling terkait bahwa pembangunan, perdamaian, keamanan dan HAM adalah saling menguatkan, dan tak satu pun negara bisa melindungi dirinya

sendirian, sehingga seluruh negara membutuhkan system keamanan yang efisien dan efektif, sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB.

Pada bagian HAM dan supremasi hukum terdapat sub-sub bagian HAM, *internal displaced person*, perlindungan dan bantuan kepada para pengungsi, supremasi hukum, demokrasi, tanggung jawab untuk melindungi warga dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan, hak-hak anak, *human security*, budaya damai, dan inisiatif dialog antarbudaya, peradaban, dan agama.

Pada bagian penguatan PBB, terdapat sub-sub bagian Majelis Umum, Dewan Keamanan, *Economic and Social Council*, *Human Rights Council*, reformasi manajemen dan sekretariat, koherensi berbagai sistem perangkat PBB, kebijakan, aktivitas-aktivitas operasional, bantuan kemanusiaan, aktivitas di bidang lingkungan, organisasi-organisasi regional, kerjasama antara PBB dan parlemen-parlemen, partisipasi otoritas lokal, sektor swasta dan masyarakat sipil termasuk organisasi-organisasi nonpemerintah, dan piagam PBB.

Khusus terkait dengan reformasi Dewan Keamanan PBB, para kepala negara sepakat mendukung reformasi awal DK PBB sebagai elemen esensial dari keseluruhan reformasi PBB, yang ditujukan untuk membuatnya lebih mewakili, efisien, dan transparan, yang nantinya akan memperkuat efektivitasnya dan kewenangan serta pelaksanaan atas keputusan-keputusannya (Disarikan dari berbagai sumber).

2.2 MDGs Sebagai Program Pembangunan Tingkat Dunia

Sidang Umum Ke-60 PBB, tanggal 14-16 September 2005, yang dihadiri para pemimpin negara dan ribuan warga masyarakat sipil di Markas Besar PBB, memiliki arti khusus, karena tidak saja membicarakan paket reformasi PBB, yang mengalami perjalanan terjal sejak pertama kali digulirkan, tetapi juga untuk mengevaluasi pelaksanaan lima tahun MDGs.

MDGs, yang disepakati para anggota PBB, sejak tahun 2000 lalu dalam sebuah KTT Global,

yang kemudian melahirkan *Millenium Declaration*, adalah suatu inisiatif global untuk mengurangi jumlah orang miskin di dunia menjadi separuhnya pada tahun 2015. MDGs memiliki delapan tujuan (*goals*) dan 18 target yang harus dicapai oleh Negara-negara berkembang dan juga negara-negara maju. Upaya masyarakat internasional untuk mencapai MDGs, pada tahun 2015, menyegarkan kembali gagasan “jebakan kemiskinan” (*poverty trap*), sebuah ide yang populer pada tahun 1950-an.

Pada masa kini, gagasan ini terutama dikembangkan oleh Jeffrey Sachs, yang adalah penasihat khusus Sekjen PBB, Kofi Annan. Ide itu menyatakan bahwa negara-negara berkembang terperangkap dalam “jebakan kemiskinan”, karena itu membutuhkan “dorongan yang kuat” (*big push*) dalam wujud bantuan luar negeri (*aid*) dan investasi untuk dapat “lepas landas” (*take-off*) dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapitanya dan tingkat kehidupan yang lebih baik.

Nilai-nilai untuk mencapai MDGs (yang disepakati di Deklarasi Milenium):

- (1) Kemerdekaan (dari kelaparan, ketakutan, ketidakadilan, dll)
- (2) Kesetaraan (antar bangsa, antarmasyarakat, antarjender)
- (3) Solidaritas (dalam mengatasi kesenjangan)
- (4) Toleransi (dalam keanekaragaman menuju kedamaian)
- (5) Penghargaan pada alam (dan melestarikan lingkungan)
- (6) Berbagi tanggung jawab (global, nasional, lokal) (Disarikan dari berbagai sumber: pen).

Upaya bersama pencapaian MDGs di Asia Pasifik: *Goal 1* sampai dengan 7, tentang berbagi Informasi/pengetahuan/pengalaman, yakni bagaimana:

- (1) Sumber dana lebih tepat menjangkau masyarakat miskin.
- (2) Informasi/pengetahuan lebih cepat/tepat sampai.
- (3) Sistem pelayanan masyarakat terjangkau masyarakat miskin.
- (4) Infrastruktur bagi masyarakat miskin dengan

- teknologi tepat guna (energi, air bersih, transportasi, komunikasi, dll).
- (5) Menggalang kemitraan pemerintah dengan swasta dan masyarakat dengan lebih efektif dan setara.
 - (6) Meningkatkan kemampuan statistik dan pendataan yang lebih akurat sehingga bisa lebih tepat sasaran.
 - (7) Mengarahkan (dan bukan diarahkan) donor/ kerja sama bilateral dan multilateral.
 - (8) Replikasi (*upscaling*) proyek-proyek percontohan yang berhasil, program nasional yang terdesentralisasi.
 - (9) Harmonisasi strategi penanggulangan kemiskinan nasional dengan pencapaian MDGs.
 - (10) Melakukan "*affirmative action*" atau memberi kesempatan/perlakuan khusus bagi "kantong-kantong kemiskinan"/daerah-daerah dengan potensi/kemampuan pencapaian MDGs yang rendah (Disarikan dari berbagai sumber: pen).

Banyak yang percaya, tetapi banyak juga yang ragu akan efektivitas MDGs, dan bahwa MDGs akan berhasil pada waktunya, sejumlah fakta menguatkan keraguan itu. Seminggu sebelum berlangsung perhelatan besar di PBB tersebut, UNDP merilis 2005 *Human Development Report : International Cooperation at a Cross-road*. Laporan tersebut menyatakan walaupun terdapat sejumlah kemajuan yang substansial yang terkait dengan pencapaian target MDGs secara global, ada banyak negara yang justru mengalami keadaan yang lebih buruk daripada waktu sebelum target MDGs disepakati.

Laporan tersebut menyatakan, 50 negara, dengan jumlah populasi 500 juta, gagal mencapai paling sedikit satu target MDGs. Dari jumlah tersebut, sebanyak 24 adalah negara di sub-Sahara dan Afrika, sedangkan 65 negara lainnya berisiko untuk sama sekali gagal untuk mencapai paling tidak satu MDGs hingga 2040. Mereka akan gagal mencapai MDGs hingga satu generasi ke depan. UNDP juga memperkirakan dengan skenario "business as usual" dari tren lima tahun terakhir. Pada 2015, terdapat sekitar 827 juta orang tetap tinggal dalam kondisi kemiskinan akut (*extreme*

poverty). Jumlah ini 380 juta lebih banyak dari target yang sudah disepakati, serta sekitar 1,7 milyar orang hidup dengan pendapatan 2 dollar AS perhari.

Laporan itu menyebutkan yang menjadi ganjalan tercapainya MDGs adalah kesenjangan yang terjadi pada tingkat global dan juga di dalam negara. 40 persen penduduk dunia hidup dengan pendapatan sebesar 5 % dari pendapatan dunia. Untuk itu, negara-negara kaya yang menerima bagian terbesar dari pendapatan dunia harus mengalokasikan bantuan (*aid*) yang lebih besar bagi negara-negara berkembang, sehingga dapat mencapai MDGs.

Sebagai sebuah ide dan proyek MDGs tidak terlepas dari kritik dan ketidakpercayaan oleh berbagai pihak, dari aktivis organisasi nonpemerintah hingga ekonom top dunia, karena dianggap terlalu menyederhanakan masalah, tanpa menyentuh atau merefleksikan perubahan struktural atas kemiskinan. William Easterly, guru besar ekonom dari New York University dan mantan ekonom Bank Dunia, menulis artikel dalam majalah *Foreign Policy*, September 2005, berjudul "The Utopian Nightmare", menyatakan upaya mengakhiri kemiskinan dunia lewat MDGs adalah utopia, dan mengkritik laporan *Millenium Project*, yang merekomendasikan sejumlah intervensi untuk mengurangi kemiskinan dengan pendekatan big push bantuan asing (*foreign aid*) bagi negara-negara miskin. Easterly juga mengkritik pendekatan MDGs sebagai suatu pendekatan "top down", dan "*free market and democracy are far from an overnight solution to poverty – they require among many other thing bottom-up evolution of the rules of the game...*" (*Kompas*, September 2005). Menurut Easterly: "... evolusi pasar dan demokrasi di negara-negara maju terjadi selama beberapa dekade, bertahap, dan tak terjadi karena ada tekanan besar dari luar. Masalah yang terjadi dengan negara-negara miskin acapkali berakar dari institusi di negara mereka sendiri, di mana pasar tidak bekerja dan politisi dan pelayan publik tidak bertanggung jawab kepada warga negaranya" (*Kompas*, September 2005).

Ada delapan sasaran MDGs yang target waktunya 2015. Ke delapan sasaran itu adalah:

- (1) Memberantas kemiskinan dan kelaparan
 - (a) Mengurangi sampai setengah jumlah penduduk yang hidup dengan penghasilan kurang dari satu dolar per hari.
 - (b) Mengurangi sampai setengah jumlah penduduk yang kelaparan.
- (2) Mewujudkan pendidikan dasar bagi semua
 - (a) Menjamin agar semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan jenjang pendidikan dasar.
- (3) Mendorong kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan
 - (a) Menghapus ketidaksetaraan jender dalam jenjang pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2005, dan di semua tingkat pendidikan pada tahun 2015.
- (4) Menurunkan angka kematian balita
 - (a) Mengurangi dua per tiga dari angka tingkat kematian anak di bawah usia lima tahun.
- (5) Meningkatkan kesehatan ibu
 - (a) Mengurangi tiga per empat dari angka tingkat kematian ibu.
- (6) Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya
 - (a) Menghentikan dan mengurangi laju penyebaran HIV/AIDS.
 - (b) Menghentikan dan mengurangi laju penyebaran malaria serta penyakit menular utama lainnya.
- (7) Menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup
 - (a) Mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan dan program-program di tingkat nasional serta mengurangi perusakan sumber daya alam.
 - (b) Mengurangi sampai setengah jumlah penduduk yang tidak memiliki akses kepada air bersih yang layak minum.
 - (c) Berhasil meningkatkan kehidupan setidaknya 100 juta penghuni kawasan kumuh pada tahun 2020.
- (8) Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan

- (a) Mengembangkan lebih lanjut sistem perdagangan dan keuangan terbuka yang berdasar aturan, dapat diandalkan dan tidak diskriminatif. Termasuk komitmen melaksanakan tata pemerintahan yang baik, pembangunan dan pemberantasan kemiskinan baik secara nasional maupun internasional.
- (b) Menangani kebutuhan khusus negara-negara yang kurang berkembang. Mencakup pemberian bebas tarif dan bebas kuota untuk ekspor mereka; keringanan pembayaran hutang bagi negara-negara miskin yang terjerat hutang; pembatalan hutang bilateral; dan pemberian bantuan pembangunan yang lebih besar untuk negara-negara yang berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan.
- (c) Menangani kebutuhan khusus negara-negara yang terkurung daratan dan negara-negara kepulauan kecil yang sedang berkembang.

2.3 Fungsi, Peran dan Manfaat Humas Internasional

Public Relations atau humas dalam skala global dan di dalam negara masing-masing, sebagian besar merupakan fenomena pasca-Perang Dunia II, yang berkembang cepat seiring dengan meningkatnya perdagangan internasional, semakin banyak bangsa mengejar perkembangan industri dan teknologi, dan semua pemerintah berupaya memperbaiki status dan eksistensinya di masyarakat dunia.

Humas internasional: “diartikan sebagai usaha terencana dan terorganisasi dari sebuah perusahaan, lembaga, atau pemerintah guna membina hubungan saling menguntungkan dengan masyarakat negara lain” (Wilcox et al, 2002: 105)

Perkembangan kegiatan humas internasional semakin didorong oleh percepatan internasionalisasi bisnis dan kekuatan public relations dan advertensi, yang sudah menjadi

konsentrasi kepemilikan media di hampir semua negara, terutama dengan berkembang pesatnya system satelit secara ekstensif seperti yang dikembangkan Rupert Murdoch, Robert Maxwell, dan wiraswastawan multimedia lainnya.

Fungsi humas internasional relatif sama dengan fungsi kegiatan humas pada umumnya, yang bila mengacu pada pendapat Cutlip dan Center, antara lain adalah :

- (1) *To ascertain and evaluate public opinion as it relates to his organization/nation*
- (2) *To counsel executive on ways of dealing with public opinion as it exist*
- (3) *To use communication to influence public opinion* (dalam Yulianita, 2001)

Selain fungsinya meyakinkan dan mengevaluasi opini masyarakat dunia, serta menggunakan berbagai strategi komunikasi untuk mempengaruhi opini publik, para pelaku humas internasional juga berperan dalam:

- (1) Memikirkan masalah-masalah internasional yang berkaitan dengan negaranya dan dengan negara-negara lain yang relevan.
- (2) Memikirkan dan mencari jalan keluar terhadap masalah-masalah nasional yang berkaitan dengan pembentukan dan pemeliharaan citra guna membangun kerjasama dengan negara-negara lain.
- (3) Menyusun, merencanakan dan melaksanakan program-program kegiatan kehumasan dengan perencanaan komunikasi yang tepat, guna memecahkan/mencari jalan keluar atas masalah-masalah tersebut. Seperti: menjembatani ketegangan atau konflik antar public internal maupun eksternal; melakukan penyebaran informasi, edukasi dan sosialisasi; merencanakan dan melakukan kegiatan publisitas; *special event management*; dll.

Kegiatan humas internasional yang kredibel dan kontinyu oleh seluruh *stakeholders*, diharapkan bermanfaat dalam membangun keselarasan antara elemen-elemen domestik dengan elemen-elemen internasional atau meminjam istilah Hassan Wirayuda “elemen intermestik”, yang hingga kini masih sangat

senjang. Idealnya, strategi humas internasional ini dimainkan bersama-sama, dengan terutama dimotori oleh seluruh institusi pemerintah, ibarat paduan musik orkestra, namun yang terjadi jauh dari harapan, antara departemen satu dengan departemen yang lain kerap kali malah saling berkompetisi, bahkan berbantahan. Bila peran dan fungsi humas internasional telah dilaksanakan dengan baik, tentunya kondisi ideal terbangunnya identitas jati diri bangsa yang berlandaskan sistem nilai dan budaya domestik akan mencuat ke permukaan, yang pada gilirannya akan mencuri perhatian dunia untuk bermitra dengan Indonesia, karena dipandang kredibel dan menguntungkan.

2.4 “Public Diplomacy” dan Upaya Mengangkat Citra Indonesia

Citra suatu negara adalah persepsi dan gambaran yang dimiliki masyarakat dunia tentang keberadaan suatu negara. Jalaluddin Rakhmat mengartikan citra sebagai berikut: “citra adalah peta kita tentang realitas dunia, tanpa citra kita akan selalu berada dalam suasana yang tidak pasti, citra adalah gambaran tentang realitas yang mempunyai makna. Citra adalah dunia menurut persepsi kita” (Rakhmat, 1999: 61). Gambaran tersebut merupakan hasil menampakkan realitas yang terorganisasikan atau terstruktur dari informasi yang diperoleh seseorang atau individu sebelumnya. Adapun Phillip Kotler memberikan pengertian citra sebagai berikut: “*Image is the set of beliefs, ideas and impressions a person holds regarding an object. People’s attitude and actions toward an object are highly conditioned by that object image*” (Kotler dalam Ruslan, 2003: 301)

Citra adalah atribut kognitif. Ia bisa berupa ingatan tentang kejadian masa lalu, fakta, atau opini. Namun citra didasarkan pada kepercayaan, tradisi, system nilai, dan budaya. Ia merupakan produk konstruksi sosial pengetahuan yang dibentuk oleh pandangan dunia, karakter nasional, pola kelembagaan, dan pandangan filosofis pribadi. Citra dari suatu bangsa atau negara tidak selamanya mencerminkan kenyataan yang sesungguhnya, karena menurut Jefkins, citra

“semata-mata terbentuk berdasarkan informasi yang tersedia.” Dengan demikian, informasi yang benar, akurat, tidak memihak, lengkap dan memadai itu benar-benar penting bagi munculnya citra yang tepat.

Citra dalam dunia realitas dan abad informasi sekarang ini memiliki kategori yang lebih luas. David Michel Levin (dalam Piliang, 2004:81) menjelaskan bahwa “manusia modern mendiami sebuah dunia yang kini telah direseur sebagai apa yang disebut ontologi potret (*ontology of picture*) atau ontologi citra (*ontology of image*). Artinya, “ada” di dunia kini telah dijajah oleh “ada dalam wujud citraan, ada dalam bentuk representasi.” Segala sesuatu kini tampil dalam bentuk representasinya dan di dalam dunia yang didominasi oleh ontologi citra, hanya representasi itu yang dianggap sebagai nyata (*real*). Piliang juga menambahkan bahwa: “Abad informasi disebut abad citraan (*the age of the image*) disebabkan realitas dunia yang dibangun oleh teknologi informasi mutakhir, menjadikan dunia disarati citra-citra dalam perwujudan dan medianya. Ini tentunya cara lain dalam menjelaskan apa yang dikatakan Heidegger sebagai abad potret dunia (*the age of the world picture*)” (Piliang, 2004:453).

Upaya mengangkat citra Indonesia kini merupakan suatu tantangan dan keniscayaan, mengingat dukungan publik dunia terhadap berbagai program MDGs di Indonesia, hampir sepenuhnya diarahkan oleh citra tentang bangsa ini. Berkaitan dengan kondisi tersebut, Menteri Luar Negeri Hassan Wirayuda menekankan perlunya diplomasi publik dijalankan dengan inovatif dan kreatif, karena persaingan sangat ketat di antara banyak negara dalam merebut perhatian publik dunia. Ditambahkan, walaupun negara ini tidak punya uang atau pendanaan dalam membangun citra positif berkaitan dengan realisasi program MDGs, tetapi memiliki kekuatan ide, pemikiran, dan prakarsa.

Tantangan terbesar dalam membangun citra saat ini adalah bagaimana menyampaikan kemajuan-kemajuan Indonesia kepada publik, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ke luar negeri, jelas penting untuk menunjukkan Indone-

sia tidaklah seburuk yang dicitrakan lembaga-lembaga asing. Sedangkan ke dalam negeri juga penting untuk menumbuhkan kepercayaan diri (*self confidence*) seluruh rakyat, menumbuhkan keyakinan atas jati diri sebagai bangsa, dan selanjutnya seluruh elemen bangsa ikut membantu menjelaskan berbagai kemajuan Indonesia itu kepada mitra-mitranya di luar Indonesia.

Selama ini, masih ada pandangan sebagian kalangan yang menganggap bahwa urusan luar negeri dan diplomasi itu adalah urusan para elit politik. Namun, mengingat beratnya “medan perang” citra di kalangan publik dunia, maka seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) diharapkan turut ambil bagian dalam perjuangan diplomasi bangsa ini. Inilah yang kemudian dikenal dengan *public diplomacy* (diplomasi publik).

Pengertian diplomasi secara umum, menurut Harold Nicolson, adalah “Penerapan intelegensi dan kebijaksanaan dalam melaksanakan hubungan resmi antara pemerintahan negara-negara merdeka.” Sedangkan menurut S. Ernest Satow adalah: “*The application of intelligence and tactic to conduct of official relations between the government of independent states*” (penerapan kecerdasan dan taktik yang dilakukan dalam membina hubungan-hubungan resmi antara dua atau lebih pemerintahan dari negara-negara mandiri/berdaulat)

Secara umum, peran diplomat, menurut L.S.Roy, adalah:

- (1) Sebagai “mata” dan “telinga” suatu negara di luar negeri, harus mampu menangkap masalah-masalah, power dan force negara-negara ybs.
- (2) Sebagai “juru bicara” dan penerjemah informasi-informasi, baik berupa dukungan atau kritik.
- (3) Sebagai pencari, pengolah, pengemas, penyampai informasi kepada publik (internal/eksternal) (Roy, 1991: 23).

Adapun *public diplomacy* tidak lain adalah kegiatan dan peran diplomasi yang dilakukan oleh seluruh stakeholders suatu bangsa atau negara secara terbuka, yang ditujukan kepada publik internasional.

3. Pembahasan

3.1 Masalah-masalah Seputar Realisasi Program MDGs di Indonesia

Terlepas dari pandangan pro dan kontra dari para ahli ekonomi dunia, kini program MDGs telah bergulir dan bahkan melaju menuju target akhir pencapaian hasilnya pada tahun 2015 nanti. Semua negara yang terkait dengan konsensus atas program tersebut, berlomba mengejar target yang telah ditetapkan bersama, termasuk Indonesia. Berbagai program pemerintah Indonesia, bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional terkait, pada tahun-tahun terakhir ini digulirkan dan disosialisasikan. Bahkan, berbagai iklan layanan masyarakat tentang MDGs marak menghiasi berbagai stasiun televisi. Namun, apakah realisasi program MDGs dengan target pengurangan kemiskinan, sudah memadai dengan upaya-upaya pemerintah dan masyarakat yang ada? Hal ini tentu saja membutuhkan analisis dan penelusuran fakta lebih jauh. Proses edukasi dan sosialisasi tentang program MDGs, saat ini masih jauh dari efektif, masih banyak kalangan yang belum memahami apa arti, maksud, dan makna program tersebut, apalagi untuk berpartisipasi dan berkomitmen terhadap program. Persoalannya, jalan keluar atas masalah pengurangan kemiskinan sesuai dengan target MDGs, tidak bisa diselesaikan hanya lewat slogan, kampanye, dan bentuk-bentuk publisitas lainnya, tetapi benar-benar membutuhkan kerja keras, peran nyata serta komitmen yang kuat dari seluruh elemen bangsa.

Kondisi di Indonesia berkaitan dengan program MDGs:

- (1) Angka kasus busung lapar yang dilansir media dapat digambarkan seperti gunung es dengan rasio 1:10. Jika hanya satu anak yang dilaporkan meninggal, sebenarnya ada 10 anak dengan kondisi sama. Kemiskinan juga telah mengantarkan perempuan dan anak Indonesia bekerja di sektor eksploitatif yang minim perlindungan, bahkan menjadi korban *trafficking*.
- (2) Baru-baru ini, Indonesia dinyatakan termasuk di jajaran negara-negara yang mundur dalam

upaya pencapaian MDGs. Laporan “*A Future Within Reach*” maupun Laporan MDGs Asia Pasifik, tahun 2006, menempatkan Indonesia dalam kategori terbawah bersama Bangladesh, Laos, Mongolia, Myanmar, Pakistan, Papua Nugini, dan Filipina.

- (3) Indonesia memperoleh skor negatif, baik dalam indeks kemajuan maupun dalam status terakhirnya. Dari 23 indikator dalam tujuh sasaran MDGs, enam di antaranya masuk ke dalam kriteria mundur, yaitu garis kemiskinan nasional, kekurangan gizi, kerusakan hutan, emisi karbon dioksida (CO₂), air bersih di perkotaan dan sanitasi di pedesaan.

Sebenarnya, upaya pengurangan kemiskinan memang membutuhkan suatu inisiatif global, dan tidak semua jenis bantuan gagal. Tetapi, upaya pengurangan kemiskinan tidak akan efektif jika masalah kemiskinan itu sendiri tidak difahami dengan benar oleh para pembuat kebijakan. Jika ini terjadi, maka dana pengurangan kemiskinan justru habis untuk program pengurangan kemiskinan, tetapi tidak untuk jumlah orang miskin.

Kemiskinan banyak disebabkan masalah-masalah struktural dalam suatu bangsa atau negara, dan oleh karena itu diperlukan kerja keras untuk mengurangi jumlah orang miskin dalam arti yang sebenarnya. Menurut ekonom Jerman, Messner dan Wolf, “pengalaman selama ini menunjukkan investasi dan strategi yang hati-hati hanya akan berhasil apabila para elit di negara berkembang berkomitmen kepada diri mereka sendiri untuk suatu proses pembangunan yang berorientasi pada MDGs dan melaksanakan prinsip *good governance* dalam melaksanakan proses tersebut.” Inilah alasan mengapa pemerintah di negara berkembang, termasuk Indonesia, harus dilihat sebagai aktor penting yang bertanggung jawab atas pencapaian MDGs, bukan hanya sebagai fasilitator apalagi objek pasif penerima program dan bantuan asing, dengan berbagai intervensinya.

Kondisi demikian tentunya menuntut pemerintah untuk segera mengeluarkan berbagai kebijakan dan keputusan politik yang berorientasi pada pembelaan terhadap kaum miskin, sebagaimana telah mereka wacanakan pada masa-

masa kampanye pemilihan yang sarat dengan janji-janji politik yang menggiurkan.

Menurut Maria Hartiningsih (*Kompas*, September 2005):

Keputusan politik untuk memecahkan berbagai persoalan di atas sangat penting sebagai bentuk komitmen negara ini dalam realisasi program MDGs. Namun, keputusan itu tidak dibuat di ruang kosong. Dalam pengambilan suatu keputusan politik, berbagai kepentingan berkompetisi. Korporasi multinasional dan lembaga-lembaga internasional bisa mengintervensi melalui para pengambil keputusan. Dalam kaitan ini, sering terjadi bahwa pihak yang paling membutuhkan perlindungan justru semakin kehilangan haknya (*Kompas*, 2005).

3.2 Peran dan Komitmen Pemerintah Indonesia dalam Program MDGs

Jika suatu negara menginginkan kedamaian, kesejahteraan, dan keberhasilan pencapaian berbagai prestasi dari warganya, maka pemimpinnya diharapkan tidak hanya sekadar konsekuen dengan konstitusi kebebasan, melainkan juga terbuka untuk merevisi berbagai konstitusi itu agar selalu selaras dengan gejala kebutuhan dan aspirasi warga negaranya, baik berupa tuntutan-tuntutan, maupun berupa dukungan untuk berpartisipasi dalam pembangunan negaranya, sesuai dengan landasan moral universal.

Sejak reformasi digulirkan, masyarakat sipil di negara ini mulai bangkit, menggeliat dari posisi tiarap dan tidurnya selama rezim Orde Baru. Kondisi ini mendorong para elit politik memoles *performance* politiknya agar dapat “diterima” oleh para konstituennya. Namun, seringkali komitmen dan keberpihakan mereka terhadap rakyat (orang miskin), hanya muncul ketika masa kampanye. Pada masa ini, semua elit politik dan semua rezim melakukan “tebar pesona”, dengan menyatakan perang terhadap kemiskinan dan korupsi yang dianggap sebagai biang kemiskinan. Realisasi dari janji perang ini, tentu saja membutuhkan peran dan komitmen yang sangat kuat dari pemerintah, karena dihadapkan pada berbagai persoalan bangsa, yang tidak hanya menyangkut aspek struktural-

fungsional, namun juga aspek nilai-budaya dan moral.

Masyarakat adalah sesuatu yang lebih dari sekadar sistem, masyarakat adalah suatu *lebenswelt* (dunia-kehidupan) yang melibatkan penghayatan nilai-nilai moral, kultural dan religius. Individu-individu dalam masyarakat adalah makhluk moral dan religius, maka ia tak hanya memberi arti teknis pragmatis pada benda-benda dan tindakannya sebagaimana dalam perspektif objektif-sistemik-strukturalis, melainkan juga memberi makna secara moral, kemanusiaan, budaya, dll. Dengan demikian, para legislator dan eksekutor negara harus memiliki komitmen tidak hanya terhadap sistem manajemen program, melainkan juga komitmen terhadap “dasar-dasar moral kemanusiaan” yang membangun solidaritas universal seluruh warga negara ini yang terdiri dari berbagai agama, suku, dan orientasi politis.

Di bidang ekonomi, peran dan komitmen pemerintah dalam program MDGs, mestinya melibatkan golongan miskin dalam bisnis yang menguntungkan. Untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan bisnis dari golongan miskin, dibutuhkan kelembagaan yang mendukung yang menekankan pentingnya kepastian, terutama terkait kontrak kerja antara pemerintah dengan masyarakat kelas bawah. Dalam hal ini, kewirausahaan sosial ekonomi masyarakat perlu difasilitasi melalui keberadaan lembaga-lembaga yang kondusif.

Pengembangan kewirausahaan sosial ekonomi perlu dikembangkan di Indonesia, dalam hal ini David Bornstein memaparkan bagaimana para wirausahawan sosial dari berbagai belahan dunia yang hampir tak terliput oleh media, namun telah mengubah arah sejarah dunia dengan terobosan berupa gagasan-gagasan inovatif, memutus sekat-sekat birokrasi, mengusung komitmen moral yang tinggi dan kepedulian (*How to Change the World*, 2004)

Selain buah kerja brilian Muhammad Yunus, pemenang Nobel Perdamaian 2006, yang dengan sistem kredit mikro “Grameen Bank”, telah membantu jutaan kaum miskin di Bangladesh, terutama perempuan dan anak, untuk memperoleh kesejahteraan yang lebih baik. Bornstein juga

menceritakan puluhan kisah wirausahawan sosial lain, seperti Fabio Rosa (Brasil) yang menciptakan sistem listrik tenaga surya yang mampu menjangkau puluhan ribu orang miskin di pedesaan, Jeroo Billimoria (India) yang bekerja keras membangun jaringan perlindungan anak-anak terlantar, Veronika Khosa (Afrika Selatan) yang membangun model perawatan yang berbasis rumah (*home-based care model*) untuk para penderita AIDS yang telah mengubah kebijakan pemerintah tentang kesehatan di negara tersebut, dan banyak lagi tokoh yang buah tangannya telah terasa langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Di Indonesia, sebuah contoh kecil kisah wirausahawan sosial dapat dilihat dari sosok Tri Mumpuni. Perempuan ini gelisah atas fakta bahwa sekitar 75 juta penduduk Indonesia masih hidup tanpa layanan listrik. Meskipun secara teknis dinyatakan layak, hambatan finansial dan aturan perundang-undangan membatasi potensinya sebagai solusi berskala besar. Dengan penciptaan insentif ekonomis dan pengembangan program-program pembiayaan, Mumpuni berhasil membantu masyarakat pedesaan Indonesia memperoleh layanan listrik (Ashoka, 2007). Individu-individu unik seperti ini, yang dapat melihat jauh ke depan tentang berbagai permasalahan yang berhubungan dengan kebutuhan fisik, sosial, ekonomi manusia, dengan komitmen kerja dan moral yang tinggi, sangat dibutuhkan. Pemerintah seharusnya memberikan dukungan dan menciptakan iklim kondusif bagi kehadiran dan eksistensi para agen perubahan seperti ini.

Paradigma dominan di Indonesia adalah bahwa pemberantasan kemiskinan merupakan *domain* utama program pemerintah, dan LSM terkait. Dunia usaha sangat kecil peran dan keterlibatannya dalam program pemberantasan kemiskinan. Padahal, di sisi lain, jika diperhatikan, perusahaan berskala besar, terutama di bidang konsumsi, telah lama mengembangkan pasar yang menjangkau golongan miskin di Indonesia. Misalnya, perusahaan telekomunikasi nirkabel menawarkan penjualan pulsa dalam kemasan yang terjangkau kalangan berpendapatan rendah, perusahaan-

perusahaan *multilevel marketing* menjangkau golongan miskin dengan berbagai produk konsumsinya, lembaga keuangan bank maupun nonbank amat agresif dalam menawarkan kredit motor kepada masyarakat berpendapatan rendah, dan kegiatan-kegiatan bisnis lainnya.

Sebenarnya, apabila berbagai program yang melibatkan golongan miskin dalam kegiatan ekonomi bisnis yang menguntungkan ini terdiferensiasi lebih luas dan terintegrasi dengan baik, melalui peran dan komitmen pemerintah, tentunya pencapaian MDGs akan menuju realisasi yang lebih konkret. Melalui berbagai “aksi-nyata”, peran dan komitmen pemerintah tidak akan hanya berhenti pada tataran wacana dan slogan-slogan dalam iklan layanan masyarakat seperti yang terjadi saat ini. Karena, setebal apa pun polesan pada wajah bangsa ini, dunia telah memiliki alat detektor canggih untuk mengenali “wajah Indonesia” yang sebenarnya.

Dengan demikian, peran dan komitmen Indonesia dalam realisasi program MDGs, memerlukan terobosan-terobosan kreatif dari berbagai kalangan, baik kalangan politisi, bisnis, maupun masyarakat sipil lainnya, sebagaimana halnya eksperimen Grameen Bank di Bangladesh yang telah menghasilkan upaya cemerlang untuk mengentaskan kemiskinan. Contoh-contoh kerja konkret dan buah pemikiran yang muncul dari kalangan masyarakat sebagai “embrio” agen perubahan sosial ekonomi, telah banyak bermunculan di seantero tanah air. Masalahnya adalah para “embrio” ini seringkali mengalami “keguguran” disebabkan faktor-faktor struktural dan situasional yang jangankan membidani, malah sebaliknya justru membuat rawan proses perkembangan dan kelahirannya.

3.3 Faktor-faktor Penentu Realisasi Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia dalam Perspektif Humas Internasional

Realisasi program MDGs dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia, ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain faktor struktural, faktor

fungsional, maupun faktor-faktor teknologi informasi dan komunikasi. Berbagai faktor tersebut jalin-menjalin dan membutuhkan penataan serta pengendalian yang fleksibel dalam berbagai situasi dan kondisi yang sering berubah seperti di Indonesia.

Faktor struktural yang penting adalah model investasi untuk memberdayakan orang miskin, yang tidak hanya didasarkan pada kebijakan ekonomi dan sosial, tetapi juga bergantung pada strategi-strategi untuk mengembangkan atau memperkuat institusi MDGs yang relevan. Antara lain, konsisten pada upaya: anti korupsi, investasi penguatan dan peningkatan efektivitas administrasi publik, pelaksanaan aturan hukum, transparansi dan akuntabilitas dalam bisnis dan politik.

Faktor fungsional yang menentukan dalam realisasi program MDGs adalah pola dan gaya kepemimpinan para elit politik, para pengelola LSM terkait, serta kalangan pengusaha. Bagaimana seluruh elemen ini melakukan pembenahan pada aspek kinerja manajerialnya agar berpihak pada golongan miskin, sangat menentukan keberhasilan program. Fungsi penegakan hukum juga sangat menentukan, Indonesia sering dikritik sebagai negara yang tak aman untuk berinvestasi karena ketidakpastian hukum dan merajalelanya pungutan liar. Perlu dicatat, pada tahun 2005, menurut survei *Transparency International*, Indonesia termasuk negara paling korup di dunia, pada urutan 132 dengan *score* 2,2. Untuk mengatasi hal ini, hubungan fungsional antara masyarakat sipil, politik dan bisnis, harus dibenahi dan diubah paradigmanya. Tidak saling menyalahkan, dan saling meniadakan, tidak saling mendominasi, tetapi saling mengisi dalam suatu rantai kerjasama yang berkesinambungan dan seimbang.

Faktor teknologi dan komunikasi juga merupakan faktor penentu keberhasilan realisasi program MDGs. Di negara ini, masih banyak yang terkait dengan manajemen informasi, atau sistem informasi manajemen yang kurang akurat dan tertata dengan baik, serta pembaruan data yang lemah, padahal sangat penting dalam proses pembuatan kebijakan atau pengambilan keputusan

yang tepat dan efisien. Hal ini menyebabkan terjadinya bencana busung lapar, flu burung dll. Pusat data di berbagai departemen seringkali bekerja tidak sebagai sistem informasi manajemen, tapi hanya sebagai pusat layanan informasi yang bekerja parsial, dan reaktif, tidak terintegrasi. Pemanfaatan Teknologi informasi bagi upaya pengentasan kemiskinan juga masih terbatas, dibanding negara lain yang telah memanfaatkan dengan baik seperti India.

Sasa Djuarsa Sendjaja, mengemukakan bahwa: “Efektivitas dan efisiensi kinerja ekonomi, politik, social, dan budaya bangsa Indonesia di masa depan sangat ditentukan oleh kemampuan segenap komponen bangsa untuk mencermati dan menyikapi dengan positif keberadaan informasi dalam semua segi kehidupan bangsa tersebut, baik di level lokal, nasional, regional, maupun global...Salah satu tanggapan positif terhadap keberadaan informasi tersebut adalah bagaimana menata suatu sistem informasi secara nasional yang mampu diakses dengan bebas oleh semua warga negara...Dukungan perangkat lunak dan keras (*software and hardware*) untuk menyebarkan informasi tersebut tentu sangat penting untuk diusahakan keberadaannya. Artinya, sebuah sistem informasi nasional berbasis teknologi multimedia di negara kita ini sekarang sudah merupakan kebutuhan mendesak untuk segera dipenuhi” (Sendjaja, 2007:1).

Berbasis sistem informasi nasional inilah proses edukasi dan sosialisasi berbagai program MDGs dapat dilakukan secara serentak dan menyeluruh. Demikian pula kesadaran untuk melaksanakan diplomasi publik oleh seluruh elemen bangsa dapat dijalankan secara lebih terarah dan terintegrasi, karena adanya informasi yang akurat tentang visi dan misi bangsa ini dalam menunjukkan eksistensinya di mata dunia.

4. Penutup

4.1 Kesimpulan

Masalah-masalah Seputar Realisasi Program MDGs di Indonesia, antara lain:

- (1) Proses edukasi dan sosialisasi tentang pro-

gram MDGs, saat ini masih jauh dari efektif, masih banyak kalangan yang belum memahami apa arti, maksud dan makna program tersebut, apalagi untuk berpartisipasi dan berkomitmen terhadap program. Upaya pengurangan kemiskinan membutuhkan suatu inisiatif global, dan tidak semua jenis bantuan MDGs gagal. Tetapi, upaya pengurangan kemiskinan tidak akan efektif jika masalah kemiskinan itu sendiri tidak difahami dengan benar oleh para pembuat kebijakan di negara yang bersangkutan. Jika ini terjadi, maka dana pengurangan kemiskinan justeru habis untuk program pengurangan kemiskinan, tetapi tidak untuk jumlah orang miskin.

(2) Para legislator dan eksekutor negara harus memiliki komitmen tidak hanya terhadap sistem manajemen program, melainkan juga komitmen terhadap “dasar-dasar moral kemanusiaan” untuk membangun solidaritas sosial universal seluruh warga negara. Kewirausahaan sosial dan ekonomi sebagai “embrio” agen perubahan di masyarakat melalui terobosan-terobosan kreatifnya perlu didukung dan difasilitasi pemerintah, agar lahir dan berkembang dengan sempurna.

(3) Realisasi program MDGs dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia, ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain faktor struktural, faktor fungsional, maupun faktor-faktor teknologi informasi dan komunikasi.

Faktor struktural, yakni membangun model investasi untuk memberdayakan orang miskin, dan mengembangkan atau memperkuat institusi MDGs yang relevan.

Faktor fungsional, yakni pola dan gaya kepemimpinan para elit politik, para pengelola LSM terkait, serta kalangan pengusaha. Dimana ketiga kalangan ini harus memiliki paradigma yang sama dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

Faktor teknologi informasi dan komunikasi, yakni membangun system informasi nasional berbasis teknologi multimedia.

4.2 Saran

(1) Jalan keluar atas masalah pengurangan kemiskinan sesuai dengan target MDGs, tidak

bisa diselesaikan hanya lewat slogan, kampanye, dan bentuk-bentuk publisitas lainnya, tetapi benar-benar membutuhkan kerja keras, peran nyata serta komitmen yang kuat dari seluruh elemen bangsa.

- (2) Harus terjadi perubahan paradigma bahwa kini masyarakatlah yang menjadi pusat *good governance*, bukan pemerintah, sehingga peran dan komitmen Indonesia dalam realisasi program MDGs, memerlukan terobosan-terobosan kreatif dari berbagai kalangan, baik kalangan politisi, bisnis, maupun masyarakat sipil lainnya.
- (3) Dibutuhkan segera Sistem Informasi Nasional berbasis multimedia, agar realisasi program MDGs dapat dijalankan oleh seluruh elemen bangsa dengan terarah dan terpadu, baik melalui kegiatan diplomasi public, proses edukasi dan sosialisasi, maupun partisipasi aktif lainnya.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Rakhmat, Jalalluddin. 1999. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Rosda Karya.
- Ruslan, Rosadi. 2001. *Manajemen Humas dan Manajemen Komunikasi*. Bandung.
- Roy, LS. 1991. *Diplomasi*, Jakarta: Rajawali.
- Sendjaja, Sasa Djuarsa, 2007, “*Jaringan Komunikasi Sosial sebagai Pilar Sistem Informasi Nasional.*” Makalah ISKI, Bandung.
- Wilcox, Dennis L., P.H.Ault., W.K. Agee. 2002. *Public Relations Strategi dan Taktik*, Jilid Dua, terj. Rosa Kristiwati. Batam: Interaksara.
- Yulianita, Neni. 2001. *Dasar-dasar Public Relations*, Bandung: P2U LPPM Unisba.

B. Bacaan Lain

- Fabby Tumiwa. 2005. “*MDGs Saja Tidak Cukup.*” *Kompas*. September.

Kompas. 2006. “*Antara Pertumbuhan dan Pemerataan.*” November.

Maria Hartiningsih. 2005. “*Selangkah Menuju Kolaps.*” *Kompas*, September.

Rakaryan Sukarjaputra. 2005. “*Dokumen Akhir KTT PBB 2005,*” *Kompas*, September.

Rakaryan Sukarjaputra. 2007. *Tantangan Mengangkat Citra Indonesia.* *Kompas*, Januari.